

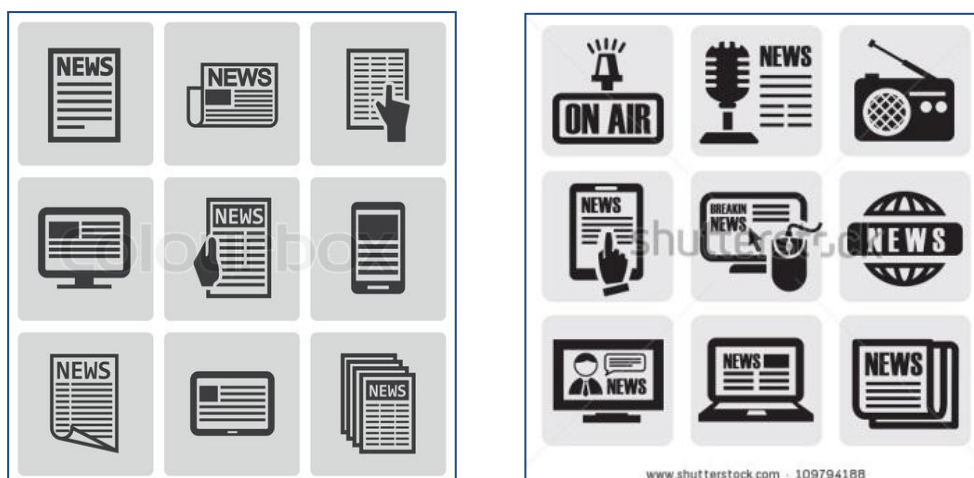


**Kementerian PPN/  
Bappenas**

## **e-Newspaper Media Online**

Politik

Rabu, 1 Oktober 2014



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan  
Jakarta, Bappenas  
2014**

## **Daftar Isi**

1. DPR WARISKAN TUNGGAKAN LEGISLASI (*Media Online Media*)
2. DEFISIT ANGGARAN DIARAHKAN UNTUK SEKTOR PRODUKTIF (*Media Online Indonesia Finance Today*)



# DPR Wariskan Tunggakan Legislasi

Tunggakan di bidang Program Legislasi Nasional selalu menjadi 'warisan' anggota dewan dari setiap periode.

**ASTRI NOVARIA**

**M**ASA kerja DPR periode 2009-2014 resmi berakhir kemarin. Namun, masih ada sejumlah RUU yang belum selesai dibahas. Dari 248 RUU yang menjadi Program Legislasi Nasional (Proleg-nas), baru 126 RUU yang disetujui dan disahkan menjadi UU. Artinya, ada 122 RUU yang belum disetujui dan diwariskan kepada DPR periode 2014-2019.

"Secara keseluruhan, dalam periode 2009-2014, DPR telah menyetujui 126 RUU untuk disahkan menjadi UU. Hasil pelaksanaan Prolegnas itu jangan hanya dilihat secara kuantitatif, tapi harus dilihat dari banyaknya UU yang benar-benar prorakyat," kata Ketua DPR Marzuki Alie dalam Rapat Paripurna Penuptan Masa Kerja DPR Periode 2009-2014, di gedung parlemen, Jakarta, kemarin.

Politikus Partai Demokrat itu mencontohkan beberapa UU yang prorakyat, antara lain UU BPJS, UU Desa, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU Bantuan Hukum, dan UU Penanganan Fakir Miskin.

Beberapa usulan dari pansus yang tidak dapat diselesaikan, ujar Marzuki, dapat dibahas oleh anggota DPR periode yang akan datang karena pertimbangan efisiensi waktu dan biaya.

Berdasarkan data yang di-

peroleh Media Indonesia, terdapat sekitar 27 RUU prioritas yang masih dalam pembicaraan tingkat I di komisi dan pansus yang belum dapat diselesaikan. Di antaranya RUU tentang Perubahan atas UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan

"Kami berharap, RUU yang tidak dapat diselesaikan dapat dibahas pada keanggotaan DPR periode mendatang."

**Marzuki Alie**  
Ketua DPR

Piutang Daerah, RUU tentang Perubahan UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, dan RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan.

RUU terakhir itu merupakan usulan DPR dan bahkan sudah diperpanjang sampai 10 kali masa persidangan. Namun, karena tidak ada kesungguhan pemerintah untuk melanjutkan, RUU itu tidak dapat diselesaikan.

Di penghujung masa kerja, DPR periode 2009-2014 terlihat maraton dalam menyetu-

ju sejumlah RUU. Misalnya, RUU tentang Hak Cipta, Pemerintahan Daerah (Pemda), Administrasi Pemerintahan, Pemilihan Kepala Daerah, Usaha Perasuransian, Pencarian Pertolongan, Jaminan Produk Halal, Perlindungan Anak, Pengelolaan Keuangan Haji, Tenaga Kesehatan, Keperawatan, Perlindungan Saksi dan Korban, Hukum Disiplin Militer, Perkebunan, Kelautan, dan Konservasi Tanah.

"Kami berharap, RUU yang tidak dapat diselesaikan tersebut dapat dibahas pada keanggotaan DPR periode yang akan datang. Meski demikian, mengenai masalah ini (*carry over* legislasi) memerlukan payung hukum yang jelas," tegas Marzuki.

**Buku saku**

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengungkap salah satu keberhasilan DPR periode 2009-2014 ialah kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pramono mengatakan baru dalam periode ini KPK diberi ruang terbuka untuk masuk ke parlemen.

"Mungkin dengan KPK, baru pertama kali ini pimpinan DPR secara resmi membuka diri mempersilakan KPK untuk hadir dalam sidang-sidang yang ada di DPR. Terakhir saya dan Pak Marzuki bertemu dengan pimpinan KPK membahas bagaimana cara pencegahan korupsi ke depan, dan rekomendasinya sudah disampaikan kepada pimpinan DPR, dan ini akan menjadi buku saku bagi anggota baru," tutur politikus PDIP itu. (P-3)

astri@mediaindonesia.com

**Tunggakan di bidang Program Legislasi Nasional selalu menjadi "warisan" anggota dewan dari setiap periode. kami berharap RUU yang tidak dapat diselesaikan dapat dibahas pada keanggotaan DPR periode mendatang**

Hashtag Berita :

#TransisiPemerintahan #KinerjaDPR

## DEFISIT ANGGARAN DIARAHKAN UNTUK SEKTOR PRODUKTIF



DECIDE NOW

subscribe dan download aplikasi Android & iOS  
di : [www.ift.co.id](http://www.ift.co.id)  
Untuk berlangganan  
koran Indonesia Finance Today  
hubungi 021-700 95499



---

# INDONESIA FINANCE TODAY

DECIDE NOW

---

Rabu, 1 Oktober 2014Halaman 24, Kolom 1-3

---

## Defisit Anggaran Diarahkan untuk Sektor Produktif

**J. Edo Nur Karena**

JAKARTA – Pemerintah baru akan mempertahankan kebijakan defisit anggaran dalam beberapa tahun mendatang. Namun, defisit akan diarahkan untuk sektor produktif guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Arif Budimanta, Anggota Kelompok Kerja Tim Transisi Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengungkapkan pemerintah baru melihat tantangan fiskal yang dihadapi tidak mudah. Dalam beberapa tahun mendatang, pemerintah baru akan memaksimalkan kebijakan fiskal ekspansif agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kalaupun kita ingin kebijakan fiskal yang ekspansif, maka defisit juga tidak diharamkan. Tapi defisit akan diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi," kata Arif saat berbincang dengan IFT di Jakarta, Selasa (30/9).

Pada APBN 2015, defisit anggaran dipatok sebesar Rp 245,9 triliun atau 2,21% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih rendah dibanding defisit yang disepakati dalam APBN Perubahan (APBNP) 2014 sebesar 2,4% dari PDB.

Arif menilai pemerintah baru sulit melaksanakan kebijakan anggaran berimbang dalam beberapa tahun mendatang sebab target pertumbuhan ekonomi dipatok tinggi. Presiden Terpilih Joko Widodo menginginkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% dapat dicapai dalam lima tahun mendatang.

Tantangan yang dihadapi pemerintah baru, menurut Arif, adalah upaya memperluas ruang fiskal dalam rangka mencapai swasembada pangan, pembangunan infrastruktur, dan kemandirian energi. Dengan Sembilan Agenda Nyata yang diusung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pemerintah baru perlu ruang fiskal yang cukup luas agar program tersebut dapat direalisasikan.

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, pemerintah baru akan menetapkan indikator kinerja yang harus diukur dalam jangka waktu tertentu. Langkah ini diperlukan agar belanja pemerintah pusat dan daerah dapat terukur secara nyata.

"Kami menginginkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) lima tahun, itu bukan hanya berisi *road map* dan *medium term expenditure*, tapi juga ada ukuran kinerja-kinerja yang harus dicapai," kata Arif.

Faisal Basri, Ekonom Universitas Indonesia, menilai selama ini desain kebijakan fiskal yang dirancang pemerintah belum mendorong sektor produktif atau peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah baru diharapkan mampu mendesain ulang kebijakan fiskal agar lebih adil.

"Belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi, paling besar itu untuk *public service* 6%-7% dari PDB, kedua untuk subsidi BBM (bahan bakar minyak), dan ketiga untuk pendidikan. Jadi, berdasarkan fungsi, pendidikan itu hanya sepertiga dari subsidi BBM," kata Faisal.

Pemerintah baru diharapkan dapat memperbaiki belanja pemerintah berdasarkan fungsi. Faisal berpendapat presiden terpilih perlu mengarahkan belanja di sektor pendidikan untuk menjamin ketersediaan SDM yang mumpuni.

Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina, menilai pemerintah perlu kembali ke komitmen untuk melakukan desentralisasi. Jika ingin melaksanakan otonomi daerah secara serius, pemerintah perlu mulai mendistribusikan belanja pemerintah ke daerah sehingga belanja pemerintah pusat tidak begitu besar.

Dalam APBN 2015, belanja pemerintah pusat dipatok sebesar Rp 1.392,4 triliun sementara transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 647 triliun. "Dulu, urbanisasi terjadi karena ada faktor penarik di kota, tapi sekarang karena faktor pendorong dari desa karena infrastruktur dan kegiatan ekonomi tidak memadai," kata Wijayanto. ●

**Pemerintahan baru akan mempertahankan kebijakan defisit anggaran dalam beberapa tahun mendatang. Namun, defisit akan diarahkan untuk sektor produktif guna mendorong pertumbuhan ekonomi**

Hashtag Berita :

#TransisiPemerintahan #APBN2015 # RPJMN(RencanaProgramJangkaMenengahNasional)